



**AKIBAT HUKUM (IMPLIKASI YURIDIS) PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF PASAL 2 JO PASAL 21 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NO 1 TAHUN 1974**

Muhammad Nafis¹, Khoirul Asfiyak², Dwi Ari Kurniawati³
Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang
[1kikialvaro3@gmail.com](mailto:kikialvaro3@gmail.com), [2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id](mailto:khoirul.asfiyak@unisma.ac.id),
[3dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

Abstract

Indonesia has different: culture such as group and race, many factors Indonesia has different culture, the factors are the geographical situation, because the high factor has many styles. After all, even though it must have been really bad for men who were visited by men and women who were living in some place. The problem of married with the other religion is still a polemic, in the reality of people's lives the practice of interfaith marriage in Indonesia can't be avoided, while the implementation of interfaith marriage itself in community is quite very difficult. In the conception of Indonesia law, the problem of marriage has been regulated nationally, in Law Number 1 of concerning marriage, which is officially valid from the date of promulgation, on 2 of January 1974. Then became effective on 1 October 1975 through regulation of the government of Republic Indonesia No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1975 concerning marriage. The purpose of this research is how to find the legal impact (juridical implication) of interfaith marriage in the perspective of Article 21 of marriage Law No 1 of 1974. This research is a library research that is legal normative legal research, using several approaches, is the legislative approaches other related approaches to regulation. The research specification in this paper is descriptive analytical in nature, so that later it is expected to be able to know the implementation of interfaith marriage to comprehensive frame of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The result of this research that Law No 1 of 1974 concerning marriage, there are no strict rules for interfaith marriage in Indonesia. So that this raises a polemic in understanding and the implementation, even relatively inconsistent this can be shown in Article 2 paragraph (1), Article 8 letter (f) and Article 21 paragraph (3) and (4) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

Keyword : *Interfaith Marriage, The validity of marital law, Law No. 1 of 1974.*

A. Pendahuluan

Di dalam realitas sebuah hukum, yang terdapat pada agama di Indonesia tidak membenarkan adanya perkawinan yang beda agama yang kemudian juga diatur oleh UU No.1 1974 tentang perkawinan. Setiap agama memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing, yaitu : seorang wanita dan seorang pria yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan baiknya memiliki agama dan kepercayaan yang sama, agar tujuan dari sebuah perkawinan yang terdapat di dalamnya Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu dapat tercapai.

Menurut agama islam, sesuai dengan ayat 221, dalam surat Al- Baqarah Allah Berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (Perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI: 2015).”*

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Agar pernikahan beda agama atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik itu tidak dilakukan sebelum satu sama lainnya benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad.

Bagi umat Kristen tidak memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Hukum agama Kristen yang berdasar pada Al-Kitab tidak mengatur tentang pernikahan beda agama, hal tersebut berdasar pada Al-Kitab efesus 5 : 22-23, tertulis bahwa *“kasih adalah dasar hidup suami-istri”*. Sehingga dapat dipahami bahwa iman Kristen menjadi dasar bagi kehidupan perkawinan, dan perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan antara orang seiman, begitu juga agama katolik dan hindu juga melarang terjadinya beda agama. Apabila tetap dilaksanakan, maka pasangan suami istri semacam itu dinyatakan tidak sah yang berarti perkawinannya batal dan tidak bisa dicatatkan di catatan sipil. “Dalam kaitannya tujuan sebuah

pernikahan untuk menjaga keharmonisan setiap pasangan untuk melahirkan prinsip pernikahan (*sakinnah, mawaddah, warahmah*) saling melindungi dan melengkapi maka, akan tercipta keluarga yang bahagia” (Alfa, 2019:51)

Apabila kita lihat dalam pasal 21 UUP No. 1 Tahun 1974 dimana ayat 3 berbunyi “*para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.*” Lalu diuraikan kembali pada ayat 4 yang berbunyi pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat yang akan memberika ketetapan, apabila ia akan menguatkan penolakan tersebut atautkah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. 2 ayat dalam pasal 21 baik itu ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa perkawinan beda agama tetap dilangsungkan dengan penetapan dari pengadilan. Demikian pula menurut pasal 35 Undang-undang No 24 Tahun 2013 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2006 tentang adminitrasi kependudukan disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dicatatkan dengan ditetapkan oleh pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di wilayah NKRI. Karena adanya kekaburan hukum di dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan beda agama, diamana pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia dan dapat memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan atas nikah beda agama. Tetapi keabsahan dari perkawinan beda agama yang dilakukan atas penetapan pengadilan negeri ini masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Keabsahan sebuah perkawinan sesungguhnya haruslah memenuhi syarat materil dan formil yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut sah baik secara agama dan Negara, bukan sah menurut agama saja, padahal sudah jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh mayoritas agama yang ada di Indonesia, yang artinya meskipun pasangan beda agama telah dicatatkan dan disahkan oleh Negara namun tidak sah menurut agama masing-masing.

B. Metode

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana dampak hukum (implikasi yuridis) perkawinan beda agama dalam perspektif Pasal 2 jo

Pasal 21 UUP No 1 Tahun 1974, serta memaparkan atau menggambarkan tentang bagaimana keabsahan perkawinan dengan cara beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis pendekatan ini dipakai oleh peneliti dikarenakan yang akan dikaji oleh peneliti adalah aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di negara kita Indonesia hingga saat ini masih terus ada, meskipun dalam pasal 2 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tidak menginginkan adanya perkawinan beda agama. Demi mendapatkan pengakuan dari Negara biasanya salah satu pihak menundukkan diri atau masuk agama pihak lain, baik masuk agama secara semu, rekayasa atau murni (*pure*) yang memang datang dari keinginan sendiri dengan penuh kesadaran tanpa didasari pada suatu tendensi ingin mendapatkan pengakuan dari Negara saja.

Salah seorang Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) cara agar pernikahan beda agama tetap dapat dilangsungkan :

- a. Meminta penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud didalam rumusan Pasal 21 UUP Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Kawin menurut agama atau kepercayaannya, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 .
- c. Tunduk pada salah satu hukum agama, artinya kedua calon pasangan suami istri menentukan pilihan hukum. Dimana salah satu pihak berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum.
- d. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Para pemerhati hukum terbelah menjadi dua pendapat terkait syarat ke empat (melangsungkan perkawinan di luar negeri) sebagai bentuk alternatif untuk dapatnya melangsungkan perkawinan beda Agama. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara demikian itu sah, dengan syarat pasanagan perkawinan beda agama tersebut mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil paling lambat satu tahun

setelah kembali ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: *“Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali diwilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”*. Sedangkan pendapat kedua Prof. Zulfa Djoko Basuki beranggapan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri tidak sah, karena bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya Pasal 56 ayat (2) tersebut hanya memenuhi persoalan administratif saja.

Praktek perkawinan beda agama di tahun lalu kembali terjadi, yang dilakukan oleh salah satu kalangan selebritis yang berlainan agama dan berbeda keyakinan. Di tahun 2018 tepatnya pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara yang melangsungkan perkawinan beda agama, yang salah satunya memiliki berbeda keyakinan, dimana dimas anggara yang beragama islam, sementara Nadine beragama katolik. Itu adalah salah satu contoh dari beberapa sekian banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Negara kita Indonesia. Suatu kejadian yang tidak bisa dihindari yang muncul di tengah kehidupan masyarakat heterogen, berbeda beda, beraneka agama, dari agama, budaya, suku, dan adat istiadat.

2. Dampak Hukum dan Keabsahan Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 Jo Pasal 8 butir (f) dan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas tentang perkawinan, dimana perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pribadi pasangan suami istri saja, akan tetapi perlu juga memperhatikan dari berbagi aspek yakni, aspek agama, sosial dan hukum. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya penting sekali memperhatikan sahnya sebuah perkawinan yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 2 UUP nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. artinya bahwa tidak dimungkinkannya sebuah perkawinan dilakukan dengan cara beda agama. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya sendiri dengan melakukan perkawinan beda agama. begitu juga bagi orang agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Budha yang diakui oleh Negara kita Indonesia, adanya

tidak dimungkinkannya dilakukan perkawinan beda agama tersebut, hal ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, *“yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”*. Sementara Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur masalah administratif saja dengan maksud agar mendapatkan pengakuan dari Negara terhadap perkawinan tersebut.

UUP No 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan dengan cara beda agama. Hanya saja dapat terlihat dari ketentuan Pasal 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974 jelas nampak bahwa pasal tersebut yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan disandarkan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Apabila sebuah perkawinan dilangsungkan sejalan ajaran hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan yang demikian berhak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu”* selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan *“yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”*.

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus berdasar pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang keabsahannya didasarkan pada agama dan perkawinan tersebut dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika kedua belah pihak ini beragama yang satu maka tidak akan menimbulkan masalah, sebaliknya jika calon suami istri ini berbeda agama, maka disinilah timbulnya masalah hukum. Masalah yang demikian itu tidak akan menjadi rumit apabila salah satu pasangan suami istri rela untuk mengikuti agama kepada pihak yang lainnya, tetapi masalah hukum ini muncul dan terjadi bila mana kedua belah pihak tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing.

Di Negara kita Indonesia perkawinan dilakukan dengan cara beda agama masih merupakan suatu permasalahan yang tidak ada habisnya, perlunya dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kepentingan hukum masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama mendapatkan kepastian hukum dan menjadi jelas. Mengenai keabsahan perkawinan dengan cara beda agama ini sebenarnya sampai hari ini masih

belum ada suatu aturan secara khusus, sehingga didalam prakteknya salah satu pihak dari calon suami istri berpindah agama kepada salah satu calon suami istri lainnya demi untuk memudahkan perkawinan tersebut, kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada agamanya masing-masing. Disamping itu ada juga yang melangsungkan perkawinan di luar negeri setelah itu baru mereka mendaftarkan perkawinan tersebut di negara kita Indonesia.

Oleh kerena itu, dikarenakan persoalan perkawinan beda agama ini tidak dapat di hilangkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan demikian untuk mendapatkan kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu aturan yang bersifat tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama. Sejauh ini setidaknya-tidaknya ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh calon pasangan suami istri yang akan melakukan sebuah perkawinan dengan cara beda agama diantaranya:

- 1) Satu diantaranya dari calon suami istri mampu berpindah agama, akan tetapi hal ini adalah sebuah tindakan yang kemudian bisa dikategorikan sebagai bentuk tindakan penyelundupan hukum, kalau kemudian perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon tersebut hanya untuk menyasiasi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.
- 2) Pihak calon suami istri dapat menggunakan dasar yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/pdt/1986. Adanya putusan Mahkamah agung Nomor 1400.K/pdt/1986 tersebut bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh seorang perempuan Islam yaitu Ani Vonny Gani dengan seorang laki-laki Kristen Petrus Hendrik Nelwan.

Selain adanya putusan Mahkamah Agung sesuai no perkara 1400.K/pdt/1986, yang memberikan ruang bisa dilakukannya perkawinan beda agama di Indonesia. Ada satu Pasal didalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya melemahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Adapun Pasal yang dimaksud adalah Pasal 21 UUP Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (3)

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”.

Pasal 21 ayat (4)

“Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan”

Dengan berlakunya pasal 21 ayat (3), (4) UUP no 1 Tahun 1974 tersebut diatas, hal ini menyebabkan adanya multitafsir, sehingga dilarangnya perkawinan beda agama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf (f) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi berlaku secara mutlak (*absolut*). Karena para pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan terkait persoalan tersebut, dan pengadilan berwenang untuk memberikan sebuah ketetapan, apakah ketetapan itu kembali menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan beda agama tersebut tetap dilangsungkan. Artinya ujung tombak boleh tidaknya perkawinan beda agama dilangsungkan tidak lagi berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 8 huruf (f), melainkan bergantung pada keputusan pengadilan.

Di samping berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sebagai bentuk pelemahan terhadap Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf (f). Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, juga memberikan kemungkinan dilakukannya perkawinan beda agama. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai Undang-Undang *Lex specialis* tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya diperuntukkan kepada satu golongan agama tertentu, namun UU tersebut dibuat dan diberlakukan untuk semua agama. Sehingga, tidak tepat jika ada yang beranggapan bahwa UUP Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. Sementara itu, Kantor Catatan Sipil sebagai Institusi Pemerintah hanya berperan sebagai lembaga pencatatan dalam bidang urusan kependudukan saja, guna memastikan hak-hak keperdataan warga negaranya terlindungi. Artinya bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak dapat di dasarkan pada UU Administrasi Kependudukan No 24 Tahun 2013.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan UUP tentang perkawinan antar agama dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah hal menyatakan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”, artinya jika perkawinan kedua belah pihak adalah sama agamanya, maka tidak akan

menimbulkan masalah baginya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Namun jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, hal tersebut akan berdampak pada keabsahan perkawinan suami-isteri dikarenakan adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan yang tidak setujuan dengan amanat pasal 2 ayat1) UUP No 1 Tahun 1974.

D. Simpulan

UUP No 1 tahun 1974 tidak sepenuhnya mengakomodir perkawinan dengan cara beda agama, bahkan didapati inkonsistensi sebagaimana yang tertuang di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dimana pasal tersebut perkawinan mengharuskan adanya syarat materil dan formil, bahkan secara terang UUP No 1 Tahun 1974 pasal 8 butir f melarang adanya perkawinan beda agama. sedangkan pasal 21 ayat 3 memberikan kelenturan dimana para calon suami istri yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan tersebut, untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Perkawinan diantara orang yang berbeda agama, hanya diatur di dalam undang-undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dimana didalam "pasal 35 huruf a ditegaskan "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi anatara dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman, 2019 *pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*. JAS.
- Arso Sosroadmodjo dan H. A Wasit Aulawi. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Ashofa B, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- PP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP Nomor 1 Tahun 1974.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Trisnarningsih, Murdiati. *Relevansi kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Bandung, CV. Utomo, 2007.